

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan merupakan salah satu dari masalah sosial yang senantiasa hadir dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di negara berkembang seperti Indonesia Masalah kemiskinan di Indonesia adalah masalah yang sejak dulu telah ada dan merupakan salah satu masalah yang saat ini menjadi sorotan utama pemerintah Indonesia yang memerlukan penanganan tepat dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia, diperlukan pula suatu kebijakan yang tepat dari pemerintah, karena angka kemiskinan di Indonesia saat ini masih menempati angka yang cukup tinggi dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia ialah 1,365 juta orang atau 9,45% pada bulan maret tahun 2019. (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2019).

Terdapatnya penduduk miskin di Indonesia dapat menghambat tercapainya tujuan Nasional Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4 yang berbunyi: *“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”*. Untuk menangani masalah kemiskinan dan demi tercapainya salah satu tujuan nasional Negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Kesejahteraan merupakan keseluruhan kebutuhan jasmani dan rohani yang terpenuhi secara seimbang dalam sebuah keluarga sesuai dengan tingkat hidup. Setatus kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga baik pengeluaran untuk kebutuhan pokok atau pengeluaran bukan pokok yang seimbang, sebaliknya jika pengeluaran pokok lebih besar di bandingkan dengan pengeluaran kebutuhan pokok, bisa dikategorikan sebagai rumah tannga dengan status kesejahteraan yang masih rendah. (Badan Pusat Statistika, 2017)

Dari kutipan yang di ambil Badan Pusat Statistik, kesejahteraan merupakan kumpulan dari jasmani dan rohani dari rumah tangga yang terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup keluarga. Status kesejahteraan dapat di ukur berdasarkan tingkat

kebutuhan pokok keluarga, semakin tinggi kebutuhan pokok keluarga maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya dan apabila tingkat kebutuhannya rendah maka sudah dipastikan tingkat kesejahteraannya rendah.

Dalam Undang-undang republik Indonesia Nomer 52 tahun 2009 dikatakan bahwa keluarga terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak baik spiritual maupun material, bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, terjalin hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.

Miskin menurut BKKBN didenifisikan berdasarkan konsep kesejahteraan keluarga dengan membagi kriteria keluarga kedalam empat tahapan, yaitu keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS-I), keluarga sejahtera II (KS-II), dan Keluarga Sejahtera III plus (KS-III plus). Konsep tersebut di dasarkan kepada factor-faktor yang dominan di antaranya; (1) pemenuhan kebutuhan dasar (2) pemenuhan Kebutuhan Psikologi (3) kebutuhan pengembangan (4) kebutuhan aktualisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat dan lingkungannya. Dalam hal ini, kelompok yang di kategorikan penduduk miskin oleh BKKBN adalah KPS dan KS-I.

Kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dijadikan sebagai pedoman yang berupa program terencana, terperinci dan jelas guna merespon dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi publik seperti masalah kemiskinan. Saat ini pemerintah Indonesia dapat dikatakan telah sukses dalam melaksanakan program kebijakan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin yang terdapat di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari menurunnya jumlah penduduk miskin Indonesia tahun 2019 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kesuksesan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin dapat dilihat dari tujuh tahun terakhir yang terhitung sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menurunnya tingkat kemiskinan di Indonesia dijelaskan yaitu jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat pada Maret 2016 penduduk miskin tercatat 28,01 juta orang atau 10,86% kemudian pada Maret 2017 penduduk miskin tercatat 27,22 juta orang atau 10,64%. Pada Maret 2018 jumlah

penduduk miskin menjadi hanya 25,95 juta orang atau 9,82% dan terakhir pada Maret 2019 jumlah penduduk miskin menjadi hanya 25,14 juta orang atau 9,41% (Laucereno, 2019).

Pengentasan kemiskinan di Indonesia masih sangat mendesak dilaksanakan saat ini, hal tersebut dikarenakan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin Indonesia di masa yang akan datang. Sehubungan dengan upaya pengentasan kemiskinan tersebut, terdapat program besar yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia yaitu pengentasan kemiskinan saat ini melalui kebijakan Program Keluarga Harapan yang disingkat dengan PKH.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: *“Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH”*.

Program Keluarga Harapan (PKH) ini sebagai bentuk pembelajaran kepada masyarakat miskin agar dapat lebih disiplin dalam mengelola bantuan agar dirasakan menjadi lebih bermanfaat dan bertanggungjawab dalam meningkatkan kualitas pendidikan, dan kesehatan. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan kontribusi dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program pemberian bantuan sosial (*Conditionality Social Transfer*) tunai bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membuka akses keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas diantaranya ialah fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia disekitar rumah tinggal mereka. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) juga mulai didorong untuk mencakup penyandang distabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan nawacita Presiden Republik Indonesia.

Adapun tujuan program keluarga harapan (PKH) diantaranya meningkatkan aksesibilitas Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan sosial untuk mendukung

tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran dalam jangka pendek dan bisa memutus rantai kemiskinan dalam jangka Panjang. Program Keluarga Harapan (PKH) dikelola oleh Unit Pengelola PKH (UPPKH) yang dibentuk di tingkat pusat maupun daerah. KPM (Keluarga Penerima Manfaat) adalah RTSM yang memerlukan tenaga pendampingan. Pendamping PKH direkrut oleh UPPKH melalui proses seleksi dan pelatihan untuk melaksanakan tugas pendampingan masyarakat penerima program dan membantu kelancaran pelaksanaan PKH.

Pendamping PKH atau Pekerja Sosial Pendamping PKH, direkrut dari masyarakat secara terbuka. Dengan latar belakang pendidikan sarjana, para pendamping membantu RTSM/KSM KPM (Keluarga Penerima Manfaat) memanfaatkan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan. Para pendamping juga berperan mendorong keluarga meningkatkan kapasitasnya untuk penghidupan yang lebih baik. Sebagai salah satu stakeholder yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat miskin, keberadaan pendamping perlu di perhatikan lebih khusus karena akan berhadapan langsung dengan masyarakat. Jika fungsi dan peranannya tidak berjalan dengan baik maka tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut tidak dapat tercapai dan kesejahteraan keluarga tidak akan terwujud.

Menurut Direktorat Jaminan Sosial (2016, hlm. 16) *“Pendamping Program Keluarga Harapan adalah sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrak kerjakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat kecamatan”*. Pendampingan Program Keluarga Harapan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program keluarga Harapan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi *“(1) Pendamping PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f terdiri atas kegiatan fasilitas mediasi, dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial”*. Ayat (2) menyatakan *“Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan memastikan anggota keluarga penerima manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH”*.

Dari pernyataan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) tersebut dapat kita ketahui bahwa pendamping Program Keluarga Harapan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang Program Keluarga Harapan (PKH), membantu keluarga penerima manfaat PKH dengan memfasilitasi dan melakukan penyelesaian masalah atas keluhan dan pengaduan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang telah ditentukan, melakukan kegiatan rutin setiap bulan dengan memberikan motivasi dan memastikan bahwa keluarga penerima manfaat PKH untuk memenuhi kewajibannya, dan pendamping Program Keluarga Harapan juga melakukan kegiatan pertemuan kelompok dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bersama seluruh keluarga penerima manfaat PKH supaya memiliki perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku.

Berdasarkan tugas yang dimiliki oleh setiap pendamping Program Keluarga Harapan ini, peran pendamping Program Keluarga Harapan sangat penting dalam melaksanakan tugasnya secara optimal sehingga dapat tercapainya tujuan dari Program Keluarga Harapan, yaitu menciptakan kesejahteraan keluarga. Namun dalam melaksanakan tugasnya pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki kendala dan permasalahan yang dihadapi baik yang berasal dalam diri sendiri dan lingkungan luar.

Pelaksanaan tugas pendamping yang sesuai dengan keputusan Direktur Jaminan Sosial tersebut dapat menjadi acuan efektif atau tidaknya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Oleh karena itu para pendamping harus memperhatikan dengan pasti setiap tugas yang telah ditentukan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, demi tercapainya kesejahteraan keluarga melalui Program Keluarga Harapan.

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga sehingga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan dari program keluarga harapan ini, diperlukan sosok pendamping Program Keluarga Harapan untuk membantu Keluarga Penerima Manfaat PKH menjadi keluarga yang sejahtera.

Dari Hasil penelitian awal yang dilakukan, kepada pendamping Program Keluarga Harapan di Desa Gunungleutik Kecamatan Ciparay dalam membantu

kesejahteraan keluarga penerima manfaat PKH ini terdapat kendala dan permasalahan yang di hadapi salah satunya ialah seberapa besar keluarga penerima manfaat PKH masih tergantung terhadap bantuan program kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan Pengamatan penulis yang telah dikaitkan dengan kondisi dan fakta di lapangan, bahwa masih terdapatnya permasalahan terkait bagaimana peran pendamping Program Keluarga Harapan dalam membantu kesejahteraan keluarga penerima manfaat PKH agar bantuan Program Keluarga Harapan ini dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Gunungleutik Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung”.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan hasil penelitian awal di lapangan maka dapat diidentifikasi beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan, yaitu:

1. Pelaksanaan program PKH di Desa Gunungleutik, belum terlaksana secara berkala, masih bergantung pada bantuan program PKH.
2. Pemilihan penerima manfaat Program PKH belum tepat sasaran.
3. Pendamping sudah dekat dengan keluarga Penerima Manfaat (KPM) maka segala informasi mengenai PKH mudah di sampaikan.
4. Pendampingan PKH belum secara maksimal memberikan wawasan kemandirian dan bimbingan dalam bidang kewirausahaan pada penerima manfaat Program PKH.
5. Sebagian besar Keluarga Penerima Manfaat PKH di Desa Gunungleutik Sudah Sejahtera dengan adanya Bantuan Program PKH.
6. Program keluarga harapan membantu mengurangi angka kemiskinan dengan adanya pemberian bantuan secara finansial.
7. Setelah adanya bantuan Program keluarga Harapan membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan ekonomi bagi Penerima Keluarga Harapan.
8. Sebelum adanya bantuan Program PKH, kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum mencukupi untuk keluarga.

Agar penelitian ini lebih terarah, peneliti memiliki batasan masalah yaitu Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Gunungleutik kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Setelah melakukan batasan masalah, peneliti memiliki pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi keluarga Harapan dalam bidang sosial dan ekonomi di Desa Gunungleutik?
2. Bagaimana peran pendamping PKH dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya?
3. Bagaimana peningkatan kesejahteraan keluarga setelah mendapatkan program pendampingan PKH di Desa Gunungleutik?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan kondisi Keluarga Harapan dalam bidang sosial dan ekonomi di Desa Gunungleutik.
2. Mendeskripsikan peran pendamping PKH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Mendeskripsikan Peningkatan kesejahteraan keluarga setelah mendapatkan program pendampingan PKH di Desa Gunungleutik.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang berhubungan, dengan hasil penelitian yang di peroleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan Program Keluarga Harapan dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pengembang ilmu pengetahuan serta menjadi bahan pembanding antara teori dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Dapat mengetahui dan merasakan akan segala permasalahan masyarakat miskin selama ini, dengan adanya penelitian ini semata-mata menjadikan tugas bagi

para pengembang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi keluarga miskin sebagai fasilitator dan mediator bagi harapan akan keberdayaan masyarakat miskin, dan diharapkan mampu memberikan masukan bagi instansi-instansi lain mengenai potensi-potensi dan masalah-masalah yang ada dalam pemberdayaan masyarakat miskin dan dapat mengerti dan memahami pentingnya peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam membantu kesejahteraan keluarga.

b. Bagi pendamping PKH Desa Gunungleutik

Memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat di dalam bidang Pendampingan Keluarga Harapan kepada peserta yang mendapatkan program PKH.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan sumber data dasar untuk meneliti masalah mengenai peran Pendampingan Keluarga Harapan (PKH).

3. Manfaat dari Segi Isu dan Aksi Sosial

Memberikan informasi kepada semua pihak mengenai peran pendamping PKH dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Desa Gunungleutik Kecamatan Ciparay.

1.5. Struktur Organisasi Skripsi

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan selanjutnya, maka berikut ini adalah sistematik penulisan skripsi yang ditetapkan dalam pedoman karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia (2016, hlm. 20), yaitu:

BAB I PENDAHULUAN : Latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat bagi penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA : Berisikan tentang konsep-konsep dan teori-teori yang mendukung terhadap permasalahan yang diajukan, penelitian terdahulu, dan posisi teoritis peneliti.

BAB III METODE PENELITIAN : Alur penelitian, dimulai dari desain penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, tahap mengolah data, dan proses menganalisis data.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN : Pemaparan tentang hasil temuan penelitian serta pembahasan hasil temuan penelitian. Pembahasan pada bab ini adalah kesimpulan hasil dari temuan yang diselaraskan dengan teori pendukung.

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI: Simpulan dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut.